

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminah, Siti, 2014, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal, Edisi Pertama*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,
- , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- , 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- , 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara*, FH-UI, Jakarta.
- , 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UII Press, Jakarta.
- , 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 1985, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-5, Gramedia, Jakarta.
- , 1980, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta,
- Chaidir, Ellydar, 2007, *Negara Hukum Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur., dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dicey, A. V., "Introduction to the Study of the Law of the Constitution" (terjemahan Nurhadi), 2007, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusamedia, Bandung.

- , 1971, *An Introduction to the Study of the law of the Constitution*, English Language Book Society and Mac Hillan, London.
- Friedrich, Carl. J., dalam Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1980, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-UI, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2013, *Otonomi Saerah, Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematikanya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Indroharto, 1992, "Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata", Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang PTUN, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Isra, Saldi, 2013, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945: Titik Temu Daulat Rakyat dan Daulat Hukum*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- J. Prihatmoko, Joko., 2005, *Pilkada Langsung*, Pustaka Pelajar, Semarang.
- , 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kaloh, J., 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kelsen, Hans, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm. 402., diterjemahkan dari buku *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971.
- Kusnardi, Moh., dan Saragih, Bintan R., 2007, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- , 1988, *Ilmu Negara*, Cetakan II, Gaya Media Pertama, Jakarta.
- Laski, Harold, J., 1947, *The State in Theory and Practice*, The Viking Press, New York
- Lijphart, Arend, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial (Sebuah Terjemahan)*, Cetakan Pertama, Oxford University Press, London.
- , 1995, *Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensiil*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, 1992, *Hukum Tata Negara*, Cetakan V, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung.
- Manan, Bagir, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan ke-2, FH-UII., Yogyakarta.
- , 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Uniska, Jakarta
- Mangunsong, Nurainun, 2010, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Bandung.
- Merriam, Charles Edward, 1947, *Systematic Politics*, University of Chicago Press, Chicago.
- MD., Moh. Mahfud, 2009, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Murphy, Walter F., *Constitutions, Constitutionalism, and Democracy*, dalam Douglas Greenberg, Stanley Katz, sebagaimana dikutip Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahadjo, Sutjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyidin, Utang, dan Supriyadi, Dedi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia Dari Tradisi ke Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung.



- Rauf, Maswadi, dkk, 2009, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Riyanto, Astim, 2006, *Negara Kesatuan Konsep Asas dan Aktualisasinya*, Yapemdo, Bandung.
- Sabarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabine, George H., 1961, *A History of Political Theory, Third Edition*, New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston.
- Sartori, Giovanni, 1997, *Comparative Constitutional Engineering An Inquiry into Structures, Incentives and Outcome*, Second Edition, Macmillan Press Ltd., England.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberti, Yogyakarta
- , 1999, *Ilmu Negara*, Cetakan II, Liberty, Yogyakarta.
- Soekamto, Soerjono, & Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekamto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Strong, C. F., 1966, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidwick & Jackson Limited, London.
- , 1963, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Sidgwick and Jackson, London, hlm. 259-261. Dikutip dalam Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- , 1960, *Modern Constitutions*, Sidswick & Jackson Limited, London.
- Sukardja, Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- Thaib, Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia, Persepektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.

Utrecht, 1957, *Pengantar Hukum Tata Usaha Indonesia*, Balai Buku Indonesia, Jakarta.

Wahjono, Padmo, 1977, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jelinek*, Melati Study Group, Jakarta.

Wahidin, Samsul, 2011, *Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

-----, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Widarta, I., 2005, *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah*, Pondok Edukasi, Bantul.

Widjaja, HAW., 2001, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yunas, Didi Nasmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang.

Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Makalah**

Asshiddiqie, Jimly, “*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*”, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, tema “*Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*”, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Gaffar, Afan., 2002, *Prospek Reformasi Politik: Perdebatan Tentang Amandemen Undang-Undang Dasar Negara*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

## **C. Jurnal, Disertasi, Tesis.**

Anshary, Abdul Hadi, 2003, “*Menuju Trias Politika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Konstitusional tentang Pemisahan Kekuasaan Negara)*,” Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Attamimi, Hamid S., 1990, (Disertasi) *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita II*, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta.

Prameswari, Ade Pupi, 2014, *Praktik Politik Dinasti Pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jombang (Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum)*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Simamora, Janpatar, *Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis*, Mimbar Hukum, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011.

Thomson, Wiliam R., dan Palmer, Monte, 1978, *The Comparative Analysis of Politics*, G. Bingham Powelt, Jr. Contemporary Democracies, dalam jurnal Dephan *Indikator Sistem Politik Demokratis*, 2002.

#### D. Internet

“*Sejarah Pilkada di Indonesia*,” diunduh tanggal, 24 Juli 2017, <http://www.izaybiografi.com/2017/04/sejarah-pilkada-di-indonesia.html>.

“*Sekilas Tentang Sejarah Pilkada di Indonesia dari Zaman ke Zaman*,” diunduh tanggal 24 Juli 2017, <http://www.cirebontrust.com/sekilas-tentang-sejarah-pilkada-di-indonesia-dari-zaman-ke-zaman.html>.

“*Korupsi Kepala Daerah Masih Jadi Tantangan bagi KPK*,” diunduh tanggal, 25 Juli 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/09221721/korupsi.kepala.daerah.masih.jadi.tantangan.bagi.kpk>.

“*Inilah Daftar Daerah yang Menjalankan Politik Dinasti*,” diunduh tanggal, 25 Juli 2017, [http://www.kompasiana.com/primata/inilah-daftar-daerah-yang-menjalankan-politik-dinasti\\_5528d116f17e61680b8b4578](http://www.kompasiana.com/primata/inilah-daftar-daerah-yang-menjalankan-politik-dinasti_5528d116f17e61680b8b4578)

“*361 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi*,” diunduh tanggal, 26 Juli 2017, <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/08/05/66825/25/25/361-Kepala-Daerah-Terjerat-Kasus-Korupsi>.

“*Ini Poin-poin yang Disahkan dalam Revisi UU Pilkada*,” diunduh tanggal, 29 Juli 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/02/17322641/ini.poin-poin.yang.disahkan.dalam.revisi.uu.pilkada..>

#### E. Kamus, Artikel, Koran dan Lain-Lain

Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.

Kompas, Jumat, 16 Februari 1979, *Tak Ada Jatah-Jatahan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*.

Kompas, Minggu, 31 Mei 2015, Agustin Teras Narang, *Nusantara: Otonomi pada Provinsi, Hanya Gubernur yang Dipilih Langsung oleh Rakyat.*

Kompas, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2015.

Kompas, 2006, Satjipto Raharjo: *Sisi lain dari Hukum di Indonesia.*

MetroTV, 1 September 2015, *Risma Bicara Pilkada.*

Tribun Jogja, 22 Oktober 2015, *Uang Sogok Rp. 1,7 Miliar untuk Dewie.*

## **F. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Amandemen).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Amandemen).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Peraturan Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 Yang Telah Dicitak Ulang, Sumber: LN 1957/6 TLN No. 1143.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintah Daerah, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Tanggal 7 September 1959, Lembaran Negara No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1843 Tahun 1959 Yang Telah Dicitak Ulang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 (18/1965) Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1965 Yang Telah Dicitak Ulang, Sumber: LN 1965/83; TLN No.: 2778.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

## **G. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013, tanggal, 19 Mei 2014.